

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Elite Politik Lokal

Elite secara sederhana digambarkan sebagai seseorang atau sekelompok individu yang memiliki peran dan pengaruh besar jika dibandingkan dengan kelompok lain.¹ Perbedaan adalah hal yang sifatnya rasional. Perbedaan manusia antara satu dengan yang lainnya tidak hanya sebatas perbedaan fisik saja, seperti warna kulit atau bentuk tubuh seseorang. Perbedaan yang dimaksud disini adalah perbedaan keterampilan, kecerdasan, bakat, dan kekayaan dari setiap orang. Perbedaan yang tidak dapat dihindari dari setiap anggota masyarakat satu dengan lainnya menjadi awal munculnya kelompok - kelompok unggulan atau bisa disebut dengan sebutan elite. Elite pada pengertian umum merujuk pada seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kedudukan tertinggi dalam masyarakat. Reputasi yang melekat pada diri seseorang menggiring mereka tergabung dalam kelompok elite yang memiliki perbedaan dengan masyarakat yang tidak memiliki kelebihan.

Menurut *Pareto* disuatu lingkungan masyarakat, akan selalu menemukan elite dalam bidangnya masing – masing, seperti dalam bidang hukum, ekonomi, politik dan bidang kesenian atau olahraga. Mereka yang memiliki keunggulan dalam bidang tersebutlah yang berhasil menduduki struktur puncak dalam bidang kehidupan. Mereka juga bisa disebut elite dalam bidang kehidupan masing – masing. Terminologi elite menunjuk pada seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kelebihan – kelibahan untuk menjalankan peran yang berpengaruh dalam cabang kehidupan tertentu, seperti dalam bidang politik dan ekonomi.²

Pendapat yang dikemukakan *Pareto* dan *Mosca*, menyatakan bahwa dalam masyarakat akan selalu menemukan sekelompok masyarakat yang minoritas memerintah masyarakat lainnya, kelompok yang sedang memerintah biasa disebut “*governing*”

¹ M.Si (Han) Novitasari, Indah, “Bmp.Uki: In-02-Banpol-Ipol-v-2021,” 2021, <http://repository.uki.ac.id/5202/1/BAPPerbandinganPolitik.pdf>.

² Jurnal Ilmu Sosial and Ilmu Politik Volume, “Haryanto, *Elit Politik Lokal Dalam Perubahan Sistem Politik Elit Politik Lokal Dalam Perubahan Sistem Politik Haryanto*” 13, no. 2 November (2009): 131–48.

elite” dan “*non-governing elite*” kelompok elite yang tidak sedang memerintah. Kelompok elite yang sedang memerintah biasanya seseorang yang menduduki jabatan politisi. Menurut *Laswell*, elite adalah seseorang yang mempunyai kecakapan nilai – nilai yang ada karena sifat kepribadian. Elite politik dibagi menjadi dua, yaitu elite politik lokal dan elite non politik lokal, sebagai contoh elite non politik lokal adalah elite keagamaan. Menurut *Putnam* tokoh elite digambarkan sebagai berikut: *pertama*, secara eksternal, elit bersifat homogen atau berkelompok. Elite adalah sekumpulan individu yang saling mengenal baik, mempunyai latar belakang sama, dan memiliki kepentingan yang sama. *Kedua*, tokoh elit merupakan seseorang yang mengatur sendiri keberlangsungan hidupnya dan anggotanya berasal dari satu lapisan masyarakat yang sama. *Ketiga*, tokoh elite memiliki sifat otonom, kebal gugatan dari siapapun di luar kelompoknya mengenai keputusan yang telah dibuat. Semua hal politik penting diselesaikan menurut kepentingan dan tindakan kelompoknya.

Hal yang mendasar bahwa elite dan kekuasaan merupakan dua variable yang tidak bisa dipisahkan, karena elite adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki sumber – sumber untuk meraih kekuasaan. Dengan begitu, konsep mengenai elite cenderung menekan pada elite politik dengan mengacu pada pembagian kekuasaan antara elite yang berkuasa dengan elite yang tidak berkuasa yang mengarah kepada kepentingan yang berbeda.

Menurut *Powercube* berdasarkan tingkatan politik terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu : politik global, politik nasional dan politik lokal. Tingkatan politik yang saat ini sedang diteliti adalah politik lokal. Politik lokal sendiri adalah sekumpulan masalah politik pada tingkatan lokal. Maksud kata “lokal” merujuk pada suatu wilayah geografis atau tempat yang memiliki batas kewenangan menurut undang – undang. Menurut geografis politik lokal bisa berupa politik pada tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten, atau bahkan desa. Masalah yang diangkat dalam isu politik lokal biasanya tentang demokrasi, otonomi daerah, partisipasi warga, birokrasi dan lain sebagainya. Dalam hal tersebut keberlangsungan politik dan pemerintahan sangat ditentukan oleh seorang pemimpin dan peranan tokoh elit.

Menurut *Anders Uhli* demokratisasi merupakan proses yang berkesinambungan dan terus berkembang dengan faktor yang mempengaruhi proses demokrasi. Tidak hanya dibidang politik.

Maka dari itu elite politik lokal juga memiliki peran penting dalam kehidupan sehari – hari. Berikut adalah peran penting elite politik secara umum, yaitu:

1. Sebagai pelopor perubahan dalam suatu wilayah.
2. Memberikan contoh perilaku kepada masyarakat sesuai aturan – aturan yang berlaku didalamnya.
3. Menjadi motivator bagi masyarakat untuk memiliki perubahan yang terencana dan teratur.³

Keberadaan elite politik lokal tidak dapat dipisahkan dari pengaruh perubahan yang terjadi dalam sistem politik. Perubahan yang terjadi dalam sistem politik membawa pengaruh terhadap hubungan antara elite dan masyarakat. Perubahan yang terjadi membuat masyarakat tidak lagi sebagai subyek pasif dalam hubungannya dengan elite politik lokal. Dengan demikian elite juga mempertahankan posisinya yang tidak hanya bersandar pada pemerintah, tetapi diharuskan mampu untuk melakukan strategi untuk mempertahankan kekuasaan.⁴ Elite politik lokal ialah seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan tertinggi, dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih melalui pemilihan politik yang demokratis pada tingkatan lokal.

Pareto dan *Mosca* mengartikan elite secara efektif memonopoli pos – pos kunci dalam masyarakat dan dapat dikatakan elite merupakan kelas penguasa. Pengertian ini diperkuat oleh *Robert Michel* yang memiliki keyakinan bahwa kecenderungan dominasi kekuasaan oleh sekelompok minoritas tidak dapat dihindari. Dalam wadah apapun, selalu ada kelompok dominan, kuat dan mampu memerintahkan kepentingan sendiri. Kebalikannya, *Laswell* mengemukakan bahwa elite memiliki sifat pluralistic. Orang – orangnya tersebar, sosoknya bergantian dalam setiap tahapan fungsional dalam pada proses pembuatan keputusan dan memiliki peran yang berubah – ubah sesuai situasi dan kondisinya.⁵ Menurut *Laswell* status elite bisa melekat pada siapa saja yang kebetulan mempunyai peran penting. Menurut pandangan ilmuwan sosial yang sudah teruarai diatas memperlihatkan bahwa elite mempunyai pengaruh dalam proses

³ Wila-Chandrawila Supriadi, “Fungsi Dan Peran Elit Sosial Politik Dalam Masyarakat,” *Kursus Kader Tingkat Pratama, Angkatan II PDI Perjuangan*, 2002, 0–9.

⁴ P. Antonius Sitepu. “Teori-Teori Politik”. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012). 55-56.

⁵ Buku, A Biografi Penulis. “Teori Strukturasi Anthony Giddens Untuk Analisis Sosial” 3 (1998): 1–31.

pengambilan keputusan. Menurut *Miriam Budiarto*, sumber kekuasaan bisa didapat dari kedudukan, kekayaan, agama, kepandaian, kekerabatan dan keterampilan⁶. Hal yang paling penting dalam elite politik lokal ialah menjalankan usaha rasional persuasif untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam berpartisipasi politik. Elite politik lokal haruskan untuk meyakinkan masyarakat tentang arti penting dan nilai vital politik.

Dalam kekuasaan politik, *Putman* menggambarkan tingkat pengaruh seseorang dalam kekuasaan, pada tingkatan teratas adalah kelompok pembuat keputusan. Lapisan ini mayoritas memiliki jabatan resmi utama. Tingkatan kedua adalah kaum berpengaruh merupakan kaum yang memiliki pengaruh secara tidak langsung. Mereka biasanya dimintai nasihat dari pembuat keputusan yang kepentingan dan pendapatnya diperhitungkan pembuat keputusan tersebut. Lapisan ini terdiri dari para pemimpin kelompok kepentingan, banker, tan tanah, konsultan resmi dan tidak resmi. Tingkatan ketiga terdiri dari warga masyarakat yang memiliki bagian aktif dalam kehidupan politik dan pemerintahan, contohnya seperti anggota partai, editor surat kabar dan birokrat tingkat tengah. Lapisan ini biasa disebut aktivis yang memiliki jumlah lebih banyak dibandingkan kaum berpengaruh. Tingkatan keempat terdapat orang – orang yang menganggap kehidupan politik seperti halnya tontonan yang menarik. Lapisan ini merupakan publik peminat politik. Tingkatan kelima terdapat kaum pemilih. Kaum ini mempunyai sumber politik kolektif penting, namun sebagai individu mereka tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Tingkatan keenam ialah dalam istilah politik hanya menjadi objek politik dan bukan aktor. Mereka tidak mempunyai pengaruh politik.⁷

Hal yang mendasari elit politik dalam memainkan peran aktif dalam politik adalah karena menuntut para teoritis ada dorongan kemanusiaan yang tidak bisa dihindari untuk meraih kesuksesan. Politik menurut mereka merupakan permainan kekuasaan, kerana individu menerima keharusan, untuk melakukan sosialisasi serta penanaman nilai – nilai untuk menemukan ekspresi bagi pencapaian kekuasaan tersebut. Berbagai upaya dilakukan untuk

⁶ Syahril Syarbaini, Syurya Muhammad Nur, and Erman Anom, “*Teori , Media Dan Strategi*,” (Jakarta : Esa Unggul Press 2021), 127–135.

⁷ Fadli, Muhammad, Muh Kausar Bailusy, Jayadi Nas, and Achmad Zulfikar. “*Keterlibatan Elit Lokal Dalam Peningkatan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015*” 6, no. 2 (2018): 301–328.

memindahkan penekanan dari para elite dan kelompok kepada individu. *Pereto* membagi tiga tipe elite politik: pertama, elite politik memerintah dengan kelicikan. Model pemerintahan ini hanya terjadi di Negara yang menganut paham otoriter. Kedua, elite politik yang memerintah secara paksa. Model elit seperti ini banyak terjadi di Negara yang menganut paham otoriter dan komunis. Elite politik seperti ini menggunakan berbagai cara untuk mewujudkan keinginannya. Ketiga, elite politik konservatif. Elite seperti ini biasanya mempertahankan kekuasaannya dan mengedepankan kepentingan pribadi. Keempat, elite politik liberal. Yaitu elite yang bekerja untuk kepentingan umum dan membuka luas untuk menyatakan pendapat bagi setiap anggota masyarakat, bahkan memberikan masukan dan kritik.⁸

Menurut *Friedrich* mengemukakan bahwa elite politik lokal yang terorganisir dalam menentukan keputusan dan mengembangkan kebijakan dibandingkan masyarakat yang tidak teratur. Elite politik lokal sebagai mempunyai peran penting dalam politik sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan atau pendidikan mengenai ilmu politik kepada masyarakat sekitar.
2. Mendorong serta mengajak msyarakat ikut aktif dalam kegiatan politik, seperti halnya pilkades.
3. Menanamkan nilai – nilai demokrasi dalam masyarakat.

Dalam peranan di masyarakat elite politik lokal memperlihatkan kekuatan dan kekuasaannya. Hal tersebut yang menandakan secara tidak langsung masyarakat dikuasai oleh sekelompok elit yang nantinya akan menimbulkan derajat yang tidak setara. Keunggulan yang dimiliki seorang elite diperjelas dalam tesis yang diungkapkan *Keller*, sebagai berikut : posisi yang diduduki merupakan posisi utama, memiliki sifat dasar pemilihan, memiliki tanggung jawab yang lebih besar, timbal balik yang didapatkan lebih banyak untuk kebaikan hidup.⁹

2. Pemilihan Kepala Desa

Pilkades atau kepanjangan dari pemilihan kepala desa ini merupakan suatu kegiatan masyarakat desa untuk memilih calon kepala desa secara langsung. Terciptanya demokrasi lokal dengan

⁸ Andri Wiranata, "*Pengaruh Elit Lokal Dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Desa*" (*Studi Kasus : Pemilihan Kepala Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal*), no 3. (2017):12-14.

⁹ Erlina Yenda Pangestuningtyas, "*Konstestasi Elite Lokal Dalam Merespon Kebijakan Wali Amanat Desa Di Bojonegoro*," n.d., 1–11.

mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi guna menciptakan pemerintahan yang aspiratif dan pembelajaran guna menuju proses pendewasaan politik. Kepercayaan akan pilkades mampu membangun demokrasi pada tingkat desa, karena dalam pemilu (pemilihan umum) terdapat nilai – nilai kebebasan, kedaulatan rakyat dan persamaan. Setiap warga berhak untuk mencalonkan dirinya untuk menjadi bakal calon kepala desa dengan cara memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

Dalam peraturan pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 Tahun 2015, tentang Pilkades, Pasal 5:

1. Bupati / Wali kota membentuk panitia pemilihan di Kota/Kabupaten.
2. Panitia pemilihan di Kota/Kabupaten seperti yang dimaksud dalam ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut :
 - a) Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan pada tingkat Kota/Kabupaten.
 - b) Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pilkades terhadap panitia pemilihan tingkat desa.
 - c) Menetapkan jumlah kotak suara dan surat suara.
 - d) Memberi fasilitas pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan lainnya.
 - e) Menyampaikan kotak suara, kertas suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia.
 - f) Memfasilitasi penyelesaian masalah pada pemilihan kepala desa tingkat Kota/Kabupaten.
 - g) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
 - h) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang sudah ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Dalam pasal tersebut bisa dilihat bahwa Kabupaten/Kota memiliki posisi yang sangat mendasar dari segi penyelenggara, dengan hal tersebut pemerintahan Kabupaten/Kota diharapkan mampu menjadi pengawas dalam menciptakan suasana pemilihan yang kondusif, tertib serta jauh dari unsur kecurangan. Serta

dapat mendorong masyarakat ikut serta dalam mengawasi dan berpartisipasi dalam pilkades.¹⁰

Demokrasi dalam konteks pilkades merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan hal tersebut diperlukan sinergitas oleh berbagai pihak mulai dari pusat hingga tingkat daerah dalam mengawal demokrasi pada tingkat desa. Pilkades juga merupakan bentuk proses peningkatan demokrasi dalam desa. Pemimpin yang berhasil terpilih dalam pemilihan langsung akan mendapatkan legitimasi dan dukungan yang nyata dari rakyat, untuk mewujudkan keinginan sosial antara tokoh yang dipilih dan memilih. Dengan alasan tuntutan pemilih akan menjadi acuan bagi pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya.

Pemilihan kepala desa atau pilkades juga diartikan sebagai pengambilan kedaulatan ke tangan rakyat. Masyarakat di desa sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari warga negara Indonesia secara menyeluruh juga memiliki hak atas kedaulatan yang merupakan hak asasi yang telah dijamin oleh Undang – Undang 1945. Oleh karenanya masyarakat yang berada di desa wajib diberikan kesempatan untuk menentukan masa depan desanya melalui pemilihan kepala desa. Pilkades menjadi salah satu momentum politik yang mengawali proses pemerintahan di desa. Dengan maksud, kualitas pelaksanaan pilkades mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan desa, yang otomatis akan berpengaruh pada pelaksanaan pemerintahan secara nasional untuk mencapai tujuan negara. Dengan hal tersebut, pelaksanaan pilkades tidak seharusnya bersifat seremonial semata hanya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat pada tingkat desa, tetapi juga tidak boleh merusak prinsip negara demokrasi berdasarkan hukum.

Pilkades tidak hanya semata-mata sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi, tetapi sebagai instrument untuk melahirkan demokrasi yang mampu mendorong lahirnya percepatan pembangunan, kesejahteraan sosial dan memenuhi kebutuhan dasar. Menurut *Hannah Arendt*, politik ialah seni mengabadikan diri manusia. Mengabadikan diri merupakan seni untuk dikenang oleh masyarakat dan tercatat dalam sejarah, karena prestasi dan

¹⁰ Peraturan Kementrian Dalam Negeri, “Peraturan Kementerian Dalam Negeri Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa,” 2014.

jasa – jasa dalam membangun kehidupan bersama. Pemahaman tentang politik dewasa dibarengi dengan peningkatan kesadaran hukum, maka dari itu sangat penting memberikan pemahaman tentang politik dewasa agar pemahaman tentang politik tidak menimbulkan gejolak sosial khususnya dalam pilkades.¹¹

Cara pemilihan kepala desa anatar desa satu dengan yang lain bervariasi. Ada tiga aspek penting dalam menjalankan praktik demokrasi langsung, yaitu aspek kopetisi dalam anatar kontestan, liberalisasi atau kebebasan dan partisipasi. Sebelum pemilihan kepala desa diadakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diwajibkan memberi tahu secara tulis maupun lisan kepada desa 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir. Setelah itu BPD membentuk kepanitian yang sifatnya mandiri dan independent yang artinya tidak memihak kepada salah satu calon. Dasar yang menjadi landasan hukum dari proses tersebut adalah UU No 32/2004 Tentang pemerintah daerah tahun 2004 yang diperkuat oleh peraturan pemerintahan (PP) No 6/2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala dan wakil daerah, yang menandakan regulasi bersejarah pemilihan kepala daerah secara langsung.

Tugas kepala desa memang tidak mudah, yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat desa, melaksanakan pembangunan desa, melaksanakan pengembangan masyarakat desa, dan menyelenggarakan pemerintahan desa. Itulah alasannya mengapa, kepala desa dipilih melalui mekanisme demokrasi. Didalam mekanisme demokrasi ini, pemilihan kades adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh warga masyarakat desa yang berkedudukan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat. Dalam hadist politik lebih diarahkan pada aturan yang diterapkan bersifat Illahi untuk mencapai kemaslahatan umum yang berdasarkan musyawarah sehingga konsep politik lebih mengacu pada pengembangan amanat yang harus dipertanggung jawabkan secara vertikal kepada Allah SWT dan secara horizontal kepada sesama manusia. Konsep inilah yang menjadi harapan orang – orang yang menjalankan kekuasaan tersebut harus memiliki landasan pada kepentingan masyarakat. Rasulullah SAW bersabda:

¹¹ Antaki, Mark. “*What Does It Mean to Think about Politics?*” Dalam *Thinking in Dark Times: Hannah Arendt on Ethics and Politics*, Roger Berkowitz, cs (eds.). (New York: Fordham University Press, 2010). 125-133.

عن أبي ذرٍ رضي الله عنه، قال : قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ : فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي . ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

Artinya : Suatu hari, Abu Dzar berkata, “Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikanku (seorang pemimpin)? Lalu, Rasul memukulkan tangannya di bahunya, dan bersabda, ‘Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, dan sesungguhnya hal ini adalah amanah, ia merupakan kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya, dan menunaikannya (dengan sebaik-baiknya).” (HR Muslim).

Dari hadits diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar dari kepemimpinan adalah amanat. Orang yang tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan amanat dengan baik akan menyesal nanti di akhirat. Hadits tersebut menyampaikan agar hukum syariat slam supaya ditegakkan dalam kehidupan manusia sebagai aturan sosial individu. Perintah tersebut berkaitan dengan pemberian wewenang kepada manusia, semata-mata menerapkan hukum Allah SWT. Hal ini bisa dipahami bahwa dasar kekuasaan politik adalah kewenangan (otoritas) untuk menjalankan kewajiban masyarakat berdasarkan hukum Allah SWT.¹²

3. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan hal terpenting pada sebuah tatanan negara yang berlandaskan demokrasi, serta merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Modernisasi politik memiliki hubungan dengan aspek politik dan pemerintahan. Partisipasi politik pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil pemerintah. Menurut *Habert Mc Closky* mengemukakan bahwa Partisipasi politik adalah kegiatan – kegiatan yang dilakukan secara sukarela oleh warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa secara langsung dan tidak langsung, dalam proses

¹² Qodri Hasan, “*Leadership : Kepemimpinan Dalam Perspektif*,” UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten 5 (2018): 9.Francisco Luis and Gil Moncayo, “

pembentukan kebijakan umum. Pendapat yang dikemukakan *Habert Mc Closky* memberikan titik berat pada tindakan – tindakan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam partisipasi politik yaitu adanya tindakan yang dilakukan dengan sukarela dari masyarakat tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Menurut pendapat para ahli yang lain, seperti *Samuel P. Huntington* dan *Joan M* dalam buku yang ditulisnya dengan judul “Partisipasi Politik Di Negara Berkembang” mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai individu. Partisipasi bisa bersifat individual atau kelompok, terorganisir atau spontan, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. Sedangkan pada perspektif menurut *Miriam Budiarjo* yang menyatakan bahwa, partisipasi politik secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, sebagai contoh memilih seorang pemimpin negara dengan cara memilih secara langsung atau tidak langsung dan mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti pemberian suara pada pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjalin hubungan dengan pejabat atau perangkat daerah, menjadi anggota partai atau menjadi salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya.¹³

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah suatu hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang secara sukarela atau tanpa paksaan dari siapapun dalam menentukan atau pengambilan suatu kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan seorang pemimpin atau penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk dijalankan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan cara konvensional atau tidak konvensional bahkan dengan kekerasan. Dalam pemerintahan yang memiliki kewenangan membuat dan melaksanakan keputusan politik adalah pemerintah, akan tetapi masyarakat memiliki hak untuk mempengaruhi sebuah proses pembuatan serta pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh pemerintah tersebut.

¹³ Yalvema Miaz, "*Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih Pada Masa Orde Baru Dan Reformasi*", 2012.

Pola partisipasi pemilih bisa dikatakan sebagai partisipasi yang diarahkan atau di mobilisasi karena tujuan seseorang memilih adalah untuk mendapatkan imbalan materi. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh *Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson*. Politik uang adalah bentuk nyata pilihan rasional ekonomi menurut *Downs*, karena pemilih akan dihadapkan dengan kenyataan pilihan nyata antara untung dan rugi, dengan memaksimalkan keuntungan materi yang didapat.

Berdasarkan syariat islam, fenomena politik uang yang terjadi dalam pemilihan pemilihan kepala desa termasuk dalam suap menyuap, berdasarkan hadist sebagai berikut :

عن أَبِي بَكْرٍ يَعْني ابْن عِيَّاشٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ،
عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: “لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ
وَالرَّائِشَ” يَعْنِي: الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

Artinya :“Dari Abi Bakr yaitu Ibni ‘Ayyasy, dari Laits, dari Abi Al-Khathab, dari Abi Zur’ah, dari Tsauban, ia berkata: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan orang yang menjadi perantara keduanya”. (HR. Muslim)

Partisipasi politik bisa dilihat dari beberapa aspek sebagai suatu kegiatan yang dapat membedakan partisipasi aktif, partisipasi pasif, dan golput. *A. Rahman H.I* mengemukakan bahwa pada umumnya tipologi partisipasi sebagai agenda menjadi 3 yaitu:

a) Partisipasi Aktif

Partisipasi aktif adalah partisipasi yang berorientasi dalam proses input dan output.

b) Partisipasi Pasif

Partisipasi pasif adalah partisipasi yang berorientasi kepada output, yang merupakan menunggu konstitusi pemerintahan, menerima, atau mengikuti saja semua kebijakan pemerintah.

c) Golput (golongan putih) atau kelompok apatis

Golongan putih atau kelompok apatis, mereka menganggap sistem politiknya yang mempunyai efek samping dari apa yang menjadi tujuan atau cita – cita.¹⁴

¹⁴ Diryo Suparto, “Membangun Kesadaran Dan Partisipasi Politik Masyarakat”, Cet Ke 2 (Cv Cendekia Press : 2021). 21-27.

Sedangkan menurut *Cholisin* membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori, yaitu:

a) Partisipasi Politik Apatis

Seseorang atau sekelompok orang yang tidak memiliki keterlibatan diri dan mengundurkan diri dari proses politik.

b) Partisipasi Politik Spector

Seseorang atau sekelompok orang yang jarang pernah mengikuti kegiatan politik.

c) Partisipasi Politik Gladiator

Seseorang atau sekelompok orang yang secara aktif berpartisipasi dalam proses politik

d) Partisipasi Politik Pengkritik

Seseorang atau sekelompok orang yang melibatkan diri pada bentuk yang tidak konvensional.

Menurut penjelasan yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa orientasi keterlibatan politik aktif input dan output politik. Seperti itu keterlibatan politik pasif tertuju pada output saja. Disisi lain ada juga pemikiran warga pada sistem politik yang nilai memiliki dampak dari aspirasinya sehingga lebih merujuk pada keterlibatan politik yang apatis. Bentuk partisipasi politik dengan cara memberikan suara pada pemilihan kepala desa di desa Mijen merupakan suatu bentuk sebuah partisipasi yang membuat salah satu tercapainya keterlibatan pada politik yang terbiasa. Dengan semboyan yang diterapkan dalam kampanye yaitu bekerja untuk membantu pemilihan umum, membantu menjaga tempat pemungutan suara dan sebagainya.¹⁵

Jenis – jenis keterlibatan politik menurut *Almond* ada 2 yaitu diantaranya :

1. Keterlibatan politik konvensional

- Pemberian suara atau voting
- Diskusi politik
- Kegiatan kampanye
- Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
- Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administrative

2. Keterlibatan politik nonkonvensional

- Pengajuan petisi
- Berdemonstrasi
- Konfrontasi

¹⁵ Masykurudin Hafidz, “Perihal Partisipasi Masyarakat,” *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Partisipasi Masyarakat*, 2019.

d. Mogok

Bentuk partisipasi politik secara umum adalah pemberian suara pada pemilihan umum. Akan tetapi jika bentuk partisipasi politik dipahami lebih mendalam tidak hanya pemberian suara pada pemilihan umum, akan tetapi tergantung dari sudut pandang mana bentuk partisipasi tersebut dilaksanakan. Menurut *Robert Lane* partisipasi politik mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- Sebagai sarana untuk mengajar kebutuhan ekonomis.
- Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial.
- Sebagai sarana untuk mengajar nilai – nilai khusus.
- Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pada kebutuhan psikologis tertentu.¹⁶

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang mengandung unsur Peran elite politik dalam pilkades dengan studi Peran Tokoh Agama Dan Elite Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Desa 2019 (Studi Kasus Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus). Dalam hal ini, penulis mengambil beberapa referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini terlebih dahulu sebagai referensi untuk penulisan yang lebih baik. Penelitian sebelumnya digunakan sebagai referensi sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Tahun, Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Teori yang digunakan	Metode	Perbandingan dengan penelitian ini
1.	Enah, 2017, Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017 (Studi Kasus Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung	Untuk mengetahui peran tokoh agama dalam membangun kesadaran masyarakat, agar masyarakat mau memberikan hak suaranya pada pemilihan kepala desa di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung	Penelitian ini menunjukkan bahwa peran tokoh masyarakat sebagai pengelola sosial adalah melibatkan tokoh masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pilkada untuk	Teori Tokoh Masyarakat, Teori Pemilihan Kepala Desa	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.	Perbedaanya: lokasi yang diteliti berada di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten, Kudus. dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Elit : elite politik lokal,

¹⁶ André Gide, “Kajian Teori DBD,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 5–24.

	Selatan).	Bintang, Kabupaten Lampung Selatan). Untuk mengetahui sejauh mana yang dihasilkan dari peran tokoh agama dalam upaya membangun kesadaran politik pada pemilihan kepala desa Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan).	mencegah terjadinya kerucutangan. Dengan berperan sebagai penengah sengketa Pilkades, kepala desa dapat menjadi komunikator aktif sebagai penghubung calon kepala desa, sehingga mereka dapat merespon dengan cepat konflik dan isu yang muncul dalam pemilihan kepala desa.			pemilihan kepala desa, partisipasi masyarakat). Persamaan: meneliti tentang peran pemilihan kepala desa, teori partisipasi masyarakat dan metode penelitian yang digunakan.
2.	Demianus Aya, 2013, Peranan Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Bupati 2020 Di Kabupaten Halmahera Selatan	Untuk mengetahui bagaimana Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik dengan melakukan Sosialisasi Politik Dalam Pilkada Bupati di Kabupaten Halmahera Selatan	Peran pemuka agama dijalankan berdasarkan tanggung jawab keyakinan dalam masyarakat, mereka percaya bahwa penting untuk memberikan nasihat politik kepada masyarakat agar tidak terpengaruh oleh kebijakan moneter atau pengabaian. Tidak ada saran dari pemuka agama yang cenderung menjadi calon	Teori Peranan, Teori Tokoh Agama, Teori Partisipasi Politik	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data – data melalui observasi dan wawancara.	Perbedaannya: lokasi yang diteliti berada di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten, Kudus. pemilihan kepala desa dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah (elite politik lokal, pemilihan kepala desa). Persamaan: meneliti tentang peran elite agama dan metode penelitian yang digunakan.

			tertentu kepada masyarakat umum. Partisipasi masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan dalam pemilihan kepala daerah yang merupakan unsur SARA menjadi prioritas utama yang dijadikan alasan pemilihan. Ia menjadi bupati dan, sebagai hasilnya, suku terbesar yang menjadi pemimpin daerah, dalam hal ini suku TobeloGalela. Namun, selain unsur SARA, tokoh agama juga berperan mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu melalui ceramah, mahar, khutbah politik, atau nasihat politik.			
3.	Amrianto, 2014, Peranan Elit Tradisional Dalam Dinamika	Untuk mengetahui gambaran secara deskriptif tentang dinamika politik	Elit tradisional Wakatobi memainkan berbagai peran, tidak hanya	Teori Peranan, Teori Elite Tradisional, Dinamika Politik	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memperoleh	Perbedaanya: lokasi yang diteliti berada di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu,

Politik Lokal Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Wakatobi 2014	lokal dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten Wakatobi 2014 dan peranan elit tradisional dalam dinamika politik lokal pada pemilihan kepala daerah di kabupaten Wakatobi 2014.	mengandalkan status sosial untuk dukungan linguistik, tetapi juga pada intelektual, kecerdasan, pengalaman, dan komunitas, ramah dalam setiap aspek. Namun, ada juga yang mencari bantuan. Strategi yang dipilih adalah dengan menggunakan kebijakan moneter. Pengaruh kepribadian terhadap pemilihan umum di Wakatobi masih sangat dominan, dan kekuatan partai politik untuk memenangkan suara sangat kecil. Kekuatan kepribadian menjadi salah satu daya tarik pemilihan umum agar mendapat dukungan besar dari masyarakat. Jumlah tersebut pada dasarnya	Lokal, Pemilu Kepala Daerah Langsung.	data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.	Kabupaten, Kudus. pemilihan kepala daerah, dan teori yang digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah (elite politik lokal, pemilihan kepala desa).. Persamaan: metode penelitian yang digunakan
---	---	--	---------------------------------------	---	--

			merupakan salah satu ciri politik lokal yang terjadi di Kabupaten Wakatobi.			
4.	Andri Wiranata, 2017, Pengaruh Elit Lokal Dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus : Pemilihan Kepala Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal)	Untuk Mendeskripsikan proses pemilihan kepala desa di desa Mulio Rejo. Untuk Menganalisis bagaimana pengaruh dan keterkaitan elit lokal dalam pemilihan kepala desa Mulio Rejo.	Pemilihan kepala Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Deli Serdang. Dimana dalam proses pemilihan kepala desa banyak keterlibatan elit lokal. Elit dan kekuasaan merupakan dua variabel yang tidak dapat dipisahkan, karena elit merupakan sekelompok orang yang memiliki sumber-sumber untuk mencapai kekuasaan. Sumber sumber kekuasaan tersebut di gunakan untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon kepala desa yang di dukung elit tersebut. Pelaksanaan demokrasi ditingkat desa tidak seperti yang	Teori Kekuasaan, Teori Elite, Teori Elite Lokal	Menggunakan pendekatan kualitatif didukung data – data tertulis dan wawancara.	Perbedaanya: lokasi yang diteliti berada di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten, Kudus dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah (dan elite politik lokal, pemilihan kepala desa). Persamaan: meneliti tentang peran elite politik lokal, pemilihan kepala desa.

			diharapkan dan masih banyak yang dijadikan alat bagi para elit untuk penguasaan dan memperkaya diri maupun kelompok tertentu. Hal ini dapat dilihat dari besarnya keterlibatan elit lokal dalam pemilihan kepala desa Mulio Rejo dimana keterlibatan tersebut di lakukan selama proses pemilihan kepala desa. Bahkan adanya indikasi keterlibatan elit partai politik dalam pemenangan pemilihan kepala desa di desa Mulio Rejo.			
5.	Riyan Susanto, 2020, Peran Tokoh Agama Kuasa Elit Politik Dalam Pilkades 2017 Di Desa Tanjung Raja Selatan Kecamatan Tanjung Raja	untuk mengurai tentang fenomena peran tokoh agama dan elit politik gerakan dalam memobilisasi masa pada Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) di Desa Tanjung	Bentuk relasi yang dipertahankan oleh elit politik lokal dan tokoh agama untuk memilih kepala desa Tanjung Raja Selatan, Kabupaten	Teori Elit Agama, Teori Elite Politik, Teori Kekuasaan, Massa	Menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara dan observasi.	Perbedaanya: lokasi yang diteliti berada di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten, Kudus dan teori yang digunakan digunakan dalam

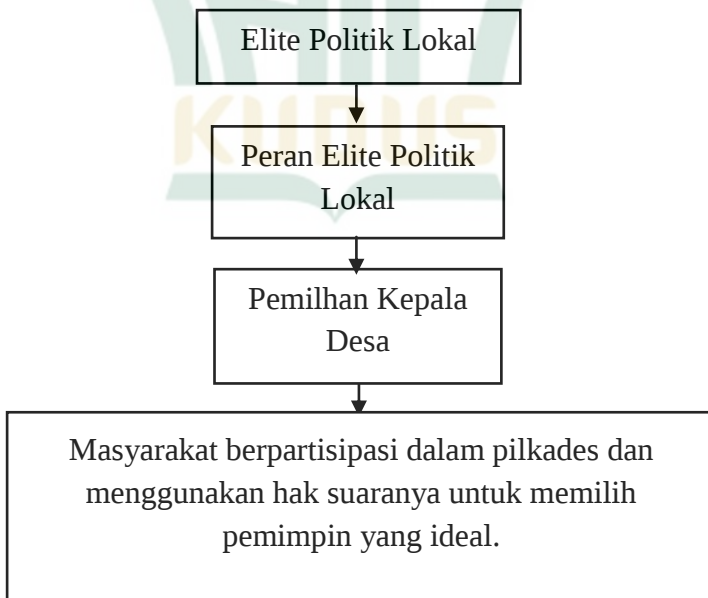
	Kabupaten Ogan Ilir.	Raja Selatan Kecamatan Tanjung Raja.	Tanjung Raja, mengambil beberapa bentuk, terutama melalui kekuasaan yang dimiliki oleh elit tersebut. yang mana kasus elit lokalitas adalah orang dengan jabatan, dewan yang ada 201 - 2019, elit desa dapat mengontrol masyarakat pada saat pemilihan kepala desa. . Model bentuk dukungan yang dilakukan oleh elit politik lokal dan tokoh agama diberikan dalam bentuk strategi, pendekatan, tekanan, dan dokumen dengan menggunakan posisi elit lokal sebagai anggota DPRD dan tokoh agama. Selama ini masyarakat hanya berpegang pada elite politik dan tokoh agama yang berkuasa,			penelitian ini adalah (elite politik lokal, pemilihan kepala desa).. Persamaan: meneliti tentang peran elite agama dan elite politik, pemilihan kepala desa dan metode penelitian yang digunakan.
--	----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

			masyarakat memilih calon yang tidak menggunakan hati nurani, memilih calon kepala desa karena pengaruh, dan tekanan dari penguasa di daerah. Takut kehilangan pekerjaan, tergiur janji, uang dan bantuan dari orang-orang berkuasa di suatu daerah.			
--	--	--	---	--	--	--

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah upaya untuk menuangkan konsep kerangka berpikir tentang keterkaitan teori dengan berbagai faktor yang telah diartikan sebagai suatu permasalahan yang penting dalam penelitian.

Tabel 2.2
Kerangka Berpikir



Keterangan:

Berdasarkan kerangka berpikir diatas menggambarkan alur sebagai penjelasan proses rencana penelitian yang akan dilaksanakan. Dimana mendeskripsikan arah penelitian mengenai adanya seorang elite yang memiliki peran penting dalam sebuah pemilihan kepala desa (pilkades), elite yang memiliki peran penting dalam pilkades ini muncul dari kalangan elit keagamaan dan elite politik lokal. Mereka memiliki peran dan tujuan masing – masing dalam pilkades di Desa Mijen. Dalam pilkdes ini penulis melihat bahwa dalam proses kampanye aktor-aktor berlomba untuk mencari partisipan sebanyak – banyaknya tak lain mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pilkades di desa, memberikan suaranya untuk memilih sosok pemimpin yang ideal. Aktor berperan aktif dalam kampanye untuk mendapatkan partisipasi dari warga masyarakat untuk memilih pasangan calon yang didukungnya. Tanpa segan aktor tersebut mendatangi dari rumah satu kerumah lain untuk mencari para partisipan sebanyak – banyaknya.

Selanjutnya, penulis melihat kasus tersebut dengan menggunakan teori elite politik yang didalamnya ada dua aktor yang memiliki peran yang sama, yang membedakan hanyalah cara menjalankan peran tersebut. Kekuasaan yang dimiliki elite politik lokal menjadi landasan para aktor untuk mengambil peran. Dan hal tersebut berhasil mendapatkan respon dari warga masyarakat yang mengikuti saran, himbauan dan perintah dari aktor elite.